

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menjadi permasalahan bagi setiap negara didunia, lonjakan penduduk mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia seperti dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahun nya membawa ancaman bagi bumi ini karena lonjakan pertumbuhan penduduk membuat ketidakmampuan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti air, udara, dan lahan. Hal ini menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang untuk menekan lonjakan pertumbuhan penduduk guna meningkatkan kualitas hidup yang baik. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara maju yang mana setiap tahun nya terjadi pegurangan penduduk asli di karenakan lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja, ditambah meluasnya akses kontrasepsi sehingga perempuan dapat memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya mengalami permasalahan dari kelongjakan penduduk, indonesia menempati urutan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara, hal ini tentunya memunculkan masalah bagi Indonesia yang harus cepat di atasi, masalah yang di sebabkan oleh

melonjaknya angka pertumbuhan penduduk di antara lain yaitu masalah jumlah penduduk yang semakin meningkat, penyebaran penduduk yang tidak merata, angka fertilitas yang relatif tinggi dan kualitas penduduk yang lebih rendah. Berdasarkan data dari website Dukcapil kemendagri jumlah penduduk Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat ada 273.879.750 jiwa, angka pertumbuhan penduduk ini mengalami kenaikan dari tahun 2020 dimana tercatat penduduk Indonesia sebanyak 2.529.861 jiwa.

Untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk pemerintahan Indonesia mengeluarkan program Keluarga Berencana sebagai solusi dari masalah pertumbuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera saja, akan tetapi juga masalah pengendalian penduduk, program keluarga berencana merupakan langkah tepat untuk pengendalian jumlah penduduk dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 56 ayat (2) undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dinas pengendalian penduduk keluarga berencana bertugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KKB). Berdasarkan keputusan Bupati Cirebon Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK yang mengatur proses pelaksanaan Kampung KB.

Program Kampung Keluarga Berencana merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Program ini merupakan salah satu program sebagai upaya penguatan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dikelola dan diselenggarakan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (sumber : kominfo.go.id).

Program Kampung Keluarga berencana termasuk dalam program pemerintah untuk mengimplementasikan agenda NAWACITA sebagai berikut:

1. Prioritas ketiga: yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dalam memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
2. Prioritas kelima: yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

3. Prioritas ke delapan: yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

Tujuan umum program Kampung KB guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta membangun sektor terkait dalam mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Tujuan khusus program Kampung KB sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta, dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern.
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program BKB, BKR, BKL, PIK Remaja.
- e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS.
- f. Menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
- j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih.

Dampak negatif jika program Kampung KB ini tidak diimplementasikan dengan baik maka pertumbuhan penduduk akan terus meningkat akibatnya akan banyak masalah yang muncul seperti turunnya kualitas manusia secara sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Implementasi merupakan proses pelaksanaan sebuah kebijakan yang sudah disusun secara matang dan terinci oleh pemerintah, yang mana dalam proses pelaksanaan implementasi akan menemukan kendala dalam proses implementasinya. Yang terjadi dalam proses implementasinya Program Kampung KB di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan terindikasi beberapa masalah diantaranya :

1. Kurangnya sumber daya manusia tenaga penyuluh keluarga berencana sehingga menghambat proses penyuluhan.
2. Kurangtepatnya sasaran program Kampung KB sehingga angka kelahiran masih tinggi di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan .

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penulis tertarik untu melakukan penelitian dengan judul : **“Imlementasi Kebijakan Kampung KB Dalam Pengendalian Penduduk Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurikan masalah yang telah diuraikan dapat diberikan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

Implementasi Kebijakan Kampung KB Dalam Pengendalian Penduduk
Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PPKB Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana ?
3. Upaya yang dilakukan PPKB Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupten Cirebon . Adapun tujuan yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan tetang program Kampung Keluarga Berencana di implementasikan tentang program Kampung Keluarga Berencana di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PPKB Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana.
3. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan PPKB Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi hambatan-hambatan daalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kampung KB.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan memiliki pengembangan ilmu Administrasi Publik, terutama untuk implementasi kebijakan program Kampung KB di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, meliputi :

- a. Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai implementasi kebijakan Kampung KB di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam implementasi kebijakan program Kampung KB di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BKKBN khusus nya pada PPKB desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dalam rangka memecahkan masalah dalam implementasi kebijakan Kampung KB, sehingga di masa yang akan datang implementasinya diharapkan lebih maksimal.

1.6 Kerangka Pemikiran

Tahap terpenting dari sebuah kebijakan adalah implementasi kebijakan, tahap ini menjadi tahapan paling berpengaruh karena dalam tahap dilaksanakannya kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya oleh pemangku kebijaka. Istilah implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *Implementation* yang berarti pelaksanaan.

Menurut George C. Edward III dalam sahya Anggara (2014:249) menyatakan bahwa implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berarti dalam tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan. Sedangkan menurut George C. Edward III dan Budi winarno (2016:177) mengemukakan bahwa :

“Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari

kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik”

George C. Edward III dalam Leo Agustino(2016:136) mengemukakan bahwa ada empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Adapun uraian variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sebagai berikut

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016-137-138) adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang paling berpengaruh karena dengan komunikasi yang baik maka suatu kebijakan akan teralisasi dengan baik, jika petugas pelaksana suatu kebijakan tidak bisa mengkomunikasikan suatu tujuan kebijakan kepada sasaran kebijakan maka akan tidak tepatnya sasaran tujuan kebijakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a. Transmisi, penyuluhan komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, yang sering terjadi dalam pelaksanaan penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miscommunication*).
- b. Kejelasan, Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureurats*) hasilnya jelas tidak membingungkan bagi masyarakat, dalam hal ini para pelaksana kebijakan harus menyesuaikan teknik komunikasi yang dipakai dengan sasaran kebijakan, karena komunikasi yang jelas dapat mempengaruhi penyelenggaraan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsisten, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan, hal ini bertujuan agar implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik di lapangan.

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya, menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2016-139), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan yaitu disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, dan tidak kompeten dibidangnya. Untuk menghindari

kegagalan tersebut harus diadakan nya pelatihan bagi staf pelaksana agar keahlian staf baik (kompeten dan kapabilitas).

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk yaitu : Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dalam hal ini implementor harus mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kebijakan agar tindakan yang diambil tepat. Kedua, informasi data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, dalam hal ini implementor harus patuh pada aturan dan hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut .
- c. Wewenang, wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat terlaksana. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, pelaksanaan kebijakan tentunya membutuhkan fasilitas staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Selain fasilitas staf implementasi kebijakan sangat membutuhkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai agar dapat berjalan dengan baik dan menghindari hambatan-hambatan pelaksanaan implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi, hal-hal penting yang perlu di cermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino, 2016:139-140), adalah :

- a. Efek disposisi; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi, Ini merujuk pada penunjukan dan mengangkat staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memengaruhi tindakan oleh para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*Self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat menurut Edward III (dalam Leo Agustino, 2016;140-141) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks

menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumbu-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi Ssebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

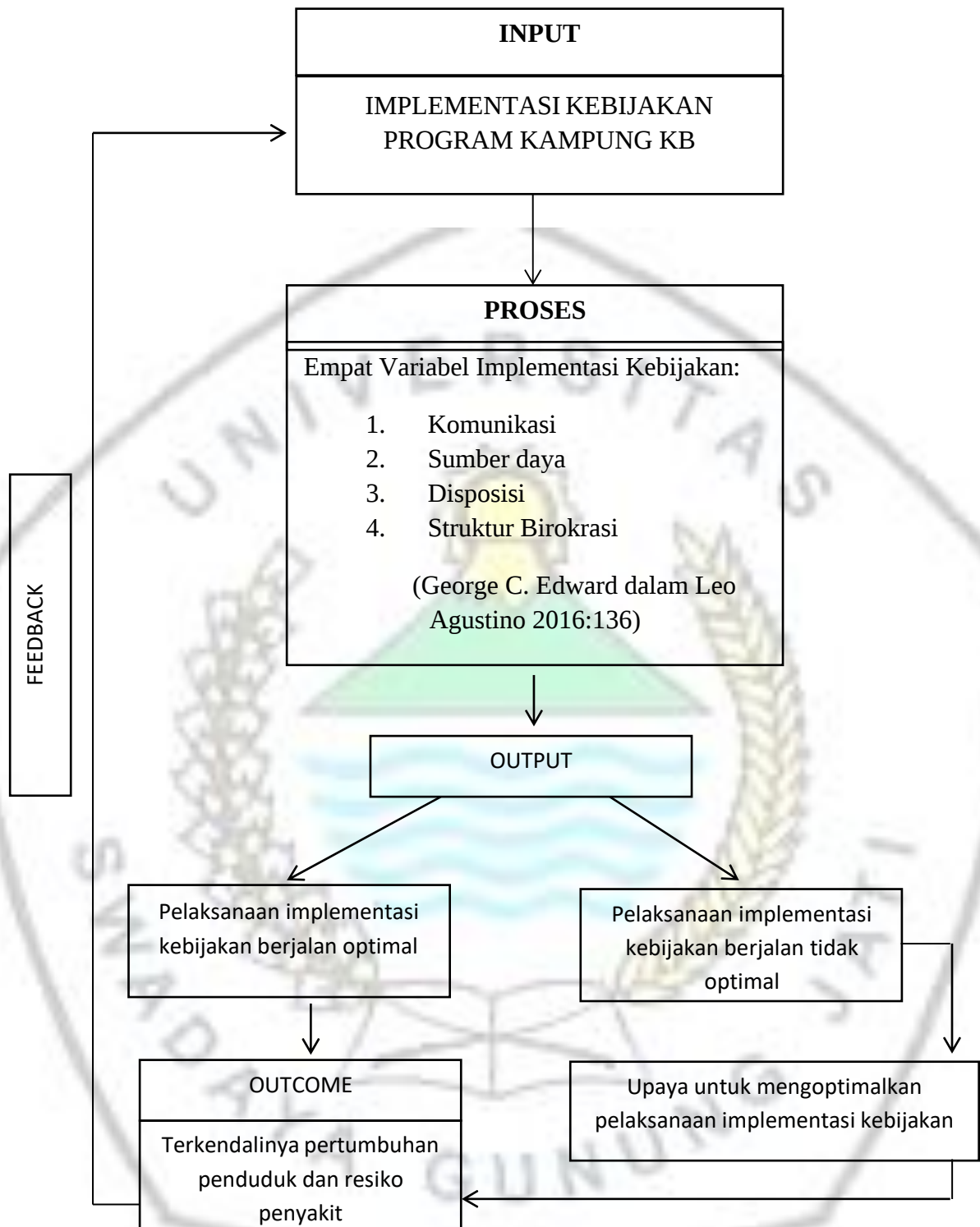
Dua kkararakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau oganisasi ke arah yang lebih baik adalah :

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga)
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuan untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivits,

kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Edward III mengemukakan bahwa keempat faktor diatas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi akan menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan..

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi Operasional Konsep Penelitian

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penelitian dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi meunjukkan pada suatu kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud dan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tampa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang di maksudkan untuk membuat program berjalan. (Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno, 2014:148)
- b. Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam

mengatasinya dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Carl Fiedrich dalam Leo Agustino, 2016:16)

- c. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mempengaruhi masalah yang merupakan masalah dari kebijakan tersebut, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan. (Edward III dalam Budi Winarno, 2016:155)
- d. Program adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan sebelum nya dengan tindakan yang terorganisir agar lebih mudah untuk dilaksanakan guna tercapainya tujuan.
- e. Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat rw, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga

berencana dan pembangunan serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.

- f. PKB merupakan merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) adalah pegawai pemda kabupaten yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana program KB Nasional ditingkat Desa/Kelurahan.
- h. Desa Sumber Lor adalah salah satu Desa di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi parameter-parameter.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka konsep penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu: (implementasi kebijakan) dioperasionalkan atau dijabarkan kedalam parameter seperti data terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan (Edward III dalam Leo Agustino, 2016:136)	1. Komunikasi	1. Penyampaian informasi atau sosialisasi 2. Kejelasan komunikasi 3. Konsisten komunikasi
	2. Sumber Daya	1. Jumlah dan kemampuan sumbe daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan 2. Fasilitas (sarana dan prasarana) 3. Sumber daya financial (dana)
	3. Disposisi	1. Sikap aparat pelaksana 2. Motivasi 3. Kemampuan aparat pelaksana dalam mengimplementasika kebijakan

	4. Struktur Birokrasi	1. Standar Operating Procedures (SOP) 2. Pembagian kerja dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan
--	-----------------------	--

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian (menurut Sugiyono,2017:2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yakni, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan dari peneliti itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang

ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metod penelitian kualitatif yang bersikap deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan yang memenuhi nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari bagaimana seorang individu , suatu kelompok ataupun suatu kejadian. Didalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian yang hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Alasan peneliti memilih medtode penelitian kualitatif deskriptif adalah karena penelitian yang digunakan bukan untuk mencari hubungan antar variabel, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan, dan memaparkan berbagai kondisi, situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

1.8.2. Informan Dan Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi, keterangan, atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, informan akan menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif.

Informan terdiri dari dua macam yaitu informan kunci (*key informant*) dan informan pendukung (*supporting informant*). Informan kunci adalah orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti tersebut. Sedangkan informan pendukung adalah orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambhan.

Berdasarkan uraian diatas, informan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Informan Kunci (*key informant*) dalam penelitian meliputi :
 - a. Kepala UPTD P5A (Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Ana) Kecamatan Babakan.
 - b. PKB/PLKB Kecamatan Babakan.
2. Informan pendukung (*supporting informant*) dalam penelitian meliputi:

- a. Masyarakat atau pasangan di Desa Sumebr Lor Kecamatan Babakan yang sudah mengikuti Program Kampung KB.
- b. Masyarakat atau pasangan di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang belum mengikuti Program Keluarga Berencana.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpan data yang dilakukan oleh penyusun meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan, penjelasan mengenai studi kepustakaan dan studi lapangan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Penyusun mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis antara lain membaca dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi lapangan

Penyusun mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kampung KB di Desa Sumbel Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang menjadi objek penelitian.

Studi lapangan terdiri dari :

- a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, dengan cara mengadakan penelitian langsung ke lapangan pada objek penelitian.

b. Wawancara

Merupakan cara untuk memperoleh data dengan cara peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan informan yang ada di tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Berbentuk gambar/foto yang relevan dengan masalah yang diteliti

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menghindari adanya penelitian yang bias, maka dalam penelitian perlu adanya keabsahan data. Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh data yang tepat dan terpercaya, menurut Moleong (2017:327), terdapat delapan teknik mengujian keabsahan data dalam rangka untuk memperoleh kredibilitas (derajat kepercayaan) yaitu adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan/keajegan pengamatan
3. Triangulasi

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi
5. Analisis kasus negatif
6. Pengecekan anggota
7. Uraian rinci
8. Auditing

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Menurut Moleong (2017:330), “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi pernyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu pengumpulan data tentang kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Peneliti melakukan keabsahan data dengan melakukan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331), dimana hal tersebut dapat dicek dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang lain di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Menurut Patton (dalam Moleong 2017:208) Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan, menyidik, mengumpulkan menggambarkan data dan menyusun data yang diperoleh dari informan dan data-data penelitian kemudian data yang diperoleh dianalisis dan

diinterpretasikan serta di bantu dengan keterangan tambahan yang mendukung. Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

a. Reduksi data

Yaitu data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain reduksi, reduksi data adalah memilih dan memilah data yang telah diperoleh, reduksi data dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian ini sangat banyak tetapi tidak semua data itu akan digunakan. Oleh karena itu, data itu harus direduksi (dipilih dan dipilah). Data yang dipilih adalah data yang relevan dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak relevan dibuang (di *drop out*).

b. Display data

Merupakan menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data ang relevan dengan fous dan masalah penelitian yang disajikan.

c. Verifikasi data

Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan, kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan, dan persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul.

d. Penarikan kesimpulan

Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi diatas.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Lokasi (objek) penelitian dilakukan di Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon 45191.

Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini yaitu :

1. Adanya permasalahan yang harus dicari pemecahannya, yaitu masalah yang relevan dengan lokasi penelitian tentang implementasi kebijakan Program Kampung KB.
2. Tempat lokasi penelitian yang terjangkau oleh peneliti, kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi ditempat penelitian.

Jadwal Penelitian

[illegible]